



PEMERINTAH KABUPATEN
EMPAT LAWANG

PEDOMAN TEKNIS **SATU MATA** **(SISTEM TERPADU** **PEMANTAUAN** **LINGKUNGAN** **BERSAMA)** **TAHUN 2025**



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Empat Lawang Terdiri dari 10 Kecamatan antara lain Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat lawang dengan kondisi Kondisi lingkungan di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan, sangat dipengaruhi oleh letak geografisnya yang berada di dataran tinggi, jaringan sungai, serta kepadatan penduduknya yang tergolong tinggi.

Berikut adalah rincian mengenai kondisi lingkungan di wilayah tersebut berdasarkan data perencanaan daerah dan statistik:

- Topografi dan Pengairan: Seluruh desa di wilayah ini merupakan daerah dataran yang subur dan dialiri oleh aliran Sungai Lintang (salah satu anak sungai di sistem Sungai Musi). Kondisi tanahnya mendukung sektor pertanian, terutama sebagai lahan persawahan dan perkebunan.
- Kepadatan Penduduk: Kecamatan ini merupakan salah satu wilayah terpadat di Kabupaten Empat Lawang. Berdasarkan data badan statistik, kepadatan penduduknya tercatat mencapai sekitar 293 jiwa per kilometer persegi, menjadikannya area dengan konsentrasi penduduk terbesar di kabupaten tersebut. Hal ini memberikan tekanan tersendiri terhadap pemukiman, sistem sanitasi, dan pengelolaan sampah domestik.
- Kerentanan Bencana Alam: Tanah longsor, Banjir, dan aktivitas gunung api karena kecamatan ini dekat dengan Gunung Dempo.

Berdasarkan data wilayah yang ada sehingga kecamatan muara pinang akan melaksanakan inovasi kegiatan yang berjudul SATU MATA (SISTEM TERPADU PEMANTAUAN LINGKUNGAN BERSAMA)berkaitan tingkat keamanan di setiap desa masing-masing dengan tujuan agar keamanan di desa masing-masing yang ada dikecamatan muara pinang berjalan dengan lancar.

B. TUJUAN

Inovasi yang dikembangkan di kecamatan muara pinang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan keamanan di setiap desa dengan judul SATU MATA (SISTEM TERPADU PEMANTAUAN LINGKUNGAN BERSAMA).

Bentuk penerapan sistem pemantauan lingkungan terpadu ini di tingkat kecamatan umumnya meliputi:

1. Pos Komando (Posko) / Pusat Pengendali Kecamatan, posko ini berfungsi untuk :
- Mengumpulkan laporan berkala dari setiap desa mengenai kondisi lingkungan (misalnya debit air sungai, potensi longsor, pembuangan sampah liar, atau kebakaran lahan).

- Menjadi pusat komunikasi darurat yang menghubungkan pihak kecamatan, Koramil, Polsek, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten.
2. Platform Digital (Aplikasi atau Grup Komunikasi Siaga)
- Untuk mendukung aspek "terpadu" dan "bersama", sistem yang digunakan berbentuk Kumpulan grup berbasis laporan misal grup Whatshap.
- Setiap kepala desa, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat (seperti karang taruna atau relawan peduli lingkungan) diberikan akses untuk melaporkan kejadian lingkungan secara real-time yang langsung terpantau oleh camat dan instansi terkait.
3. Satuan Tugas (Satgas) / Forum Relawan Lintas Sektor
- "Bersama" berarti melibatkan banyak pihak. Di tingkat kecamatan, sistem ini berbentuk Forum atau Satgas Pemantau Lingkungan Kecamatan.
- Anggotanya terdiri dari aparat kecamatan, tim medis puskesmas, penyuluh pertanian, kelompok tani, hingga organisasi pemuda.
 - Mereka secara rutin melakukan patroli bersama di titik-titik rawan (seperti lereng bukit rawan longsor atau bantaran sungai) dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
4. Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Komunitas
- Di wilayah rawan bencana seperti Muara Pinang, sistem pemantauan ini juga berbentuk jaringan alat pemantau sederhana namun terintegrasi di tingkat desa, seperti:
- Alat pengukur curah hujan manual di hulu sungai.
 - Sensor tinggi muka air sungai sederhana.
 - Kentongan atau pengeras suara masjid yang sistem komunikasinya telah disepakati bersama di bawah koordinasi kecamatan jika tanda bahaya terdeteksi oleh tim pemantau.

C. MANFAAT

Manfaat diadakannya inovasi di kecamatan muara pinang ini bermanfaat sekali untuk mewujudkan lingkungan yang aman,nyaman dan kondusif karena ada beberapa yang berintegrasi dalam proses tersebut.

D. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI DAERAH

Kecepatan penciptaan inovasi SATU MATA (SISTEM TERPADU PEMANTAUAN LINGKUNGAN BERSAMA) didorong oleh pemanfaatan sumber daya yang ada, seperti tim internal Kecamatan, serta dukungan dari masyarakat desa serta berbagai pihak terkait di Kecamatan Muara Pinang. Dengan keberhasilan yang luar biasa ini, inovasi ini membuktikan bahwa dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi antara berbagai sektor, inovasi kecamatan dapat tercipta dengan cepat dan berdampak signifikan, tanpa memerlukan biaya yang tinggi atau infrastruktur yang rumit. Dengan dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah, inovasi ini berhasil meningkatkan kapasitas inovasi kecamatan yang akan berkontribusi pada pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan di Kecamatan Muara Pinang.

E. PENGGUNAAN IT (INFORMASI DAN TEKNOLOGI)

Penggunaan inovasi untuk mendukung kelancaran informasi melalui grup whatsapp. Teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi proses pemantauan dan evaluasi penyebaran inovasi yang dilaksanakan.

Selain itu, media sosial menjadi komunikasi yang digunakan untuk mempercepat penyebaran informasi terkait perkembangan inovasi yang ada. Grup WhatsApp dan platform media sosial lainnya digunakan untuk berbagi update mengenai kegiatan inovasi.

BAB II KERANGKA PIKIR

A. KEBAHARUAN

Kerangka pikir (*conceptual framework*) dalam merancang atau menjelaskan suatu sistem terpadu berfungsi sebagai peta jalan yang menggambarkan bagaimana komponen-komponen yang awalnya terpisah disatukan untuk mencapai satu tujuan bersama.

Dalam konteks sistem terpadu (seperti sistem pemantauan lingkungan, pelayanan publik, atau manajemen data), kerangka pikir biasanya dibangun menggunakan pendekatan Input - Proses - Output - Outcome (IPOOO) yang berbasis pada integrasi dan kolaborasi.

A. Kondisi Awal (Masalah) Kerangka pikir selalu dimulai dari keresahan atau masalah yang ada di lapangan.

B. Input (Pilar Pendukung)

Untuk membangun sistem terpadu, diperlukan tiga pilar input utama:

1. Regulasi & Komitmen (*Policy*): Payung hukum atau instruksi formal agar semua sektor wajib menggunakan dan berkontribusi pada sistem ini.
2. Sumber Daya Manusia (*People*): Operator sistem, verifikator di tingkat kecamatan, hingga masyarakat atau relawan sebagai penyuplai informasi di lapangan.
3. Teknologi (*Platform*): Perangkat keras, jaringan internet, dan perangkat lunak (aplikasi/dasbor) yang menjadi wadah integrasi.

C. Proses (Mekanisme Kerja Terpadu)

Proses merupakan inti dari kebaruan sistem terpadu, yang meliputi:

- Integrasi Data (*Data Pooling*): Menggabungkan berbagai jenis data ke dalam satu database terpusat.
- Kolaborasi Aktif (*Cross-Sectoral Collaboration*): Menghubungkan berbagai instansi (misalnya: pihak Kecamatan, Puskesmas, Polsek, Koramil, dan Komunitas) dalam satu alur kerja pelaporan yang otomatis.
- Verifikasi & Distribusi Tugas: Setiap ada laporan masuk, sistem secara otomatis meneruskannya kepada instansi yang berwenang untuk segera ditindaklanjuti.

D. Output (Hasil Langsung)

Hasil instan yang diperoleh setelah sistem berjalan:

- Terwujudnya Satu Dasbor Data yang menampilkan kondisi riil di lapangan (misalnya titik rawan banjir, tumpukan sampah, atau status laporan warga).
- Dokumen pelaporan yang rapi, transparan, dan dapat diakses kapan saja oleh pembuat kebijakan.

E. Outcome & Impact (Dampak Akhir)

Tujuan akhir (hilir) dari kerangka pikir ini:

- Efisiensi Birokrasi: Menghemat waktu, tenaga, dan anggaran karena tidak ada lagi tumpang tindih tugas.
- Ketangguhan Wilayah: Respons terhadap ancaman (seperti kerusakan lingkungan atau bencana) menjadi jauh lebih cepat, meminimalisir kerugian materiil maupun korban jiwa.

inovasi yang terdokumentasi dan tidak dapat diikutsertakan dalam penilaian kabupaten

B. DESAIN INOVASI

Desain inovasi yang dilakukan mencakup beberapa elemen antara lain masyarakat, operator kecamatan, satgas dan camat kepala daerah. Konsep masyarakat Mengirim laporan, melihat status penanganan (Pending, Proses, Selesai). operator kecamatan Melakukan verifikasi laporan, memperbarui status penanganan di lapangan, mengunggah foto bukti penyelesaian.

C. SOP PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN

1. Identifikasi Permasalahan dan Pembentukan Tim Inovasi

- Tim Kecamatan Muara Pinang bersama perangkat desa, melakukan pemetaan untuk mengidentifikasi masalah utama terkait rendahnya pengelolaan inovasi kecamatan, terutama di sektor-sektor dengan potensi tinggi tetapi minim pendampingan.
- Data yang dikumpulkan meliputi potensi inovasi dari masing-masing desa, hambatan dalam pengelolaan inovasi, serta kebutuhan pendampingan teknis yang diperlukan.
- Camat menerbitkan Surat Tugas untuk pembentukan Tim Inovasi, yang terdiri dari anggota staf kecamatan, perangkat desa, Masyarakat, narasumber pendamping, dan tokoh masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya.
- Tim ini mengadakan rapat awal untuk merencanakan strategi, jadwal pelaksanaan inovasi, serta pembentukan komunitas penggerak inovasi di setiap desa.

2. Penyusunan SOP Program Inovasi dan Dokumentasi

- Tim menyusun SOP untuk pelaksanaan inovasi yang mencakup prosedur pembinaan, pelaporan, dan pencatatan hasil inovasi yang dilaksanakan.
- Modul edukasi tentang pentingnya perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan inovasi disusun untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai inovasi yang terstruktur dan sistematis.
- Data penerima manfaat, kegiatan pengembangan inovasi, serta pencapaian yang dicapai dalam setiap tahap disusun dengan menggunakan sistem manual dan berbasis digital.
- Pelaporan dilakukan secara periodik dan berbasis bukti untuk memastikan bahwa setiap kegiatan inovasi berjalan sesuai rencana.

3. Sosialisasi Inovasi dan Pelatihan Peserta

- Sosialisasi inovasi dilakukan melalui forum desa, pertemuan dengan kepala desa, tokoh masyarakat, serta pembentukan tim relawan inovasi yang akan mendampingi kegiatan pengembangan inovasi di tingkat desa dan kecamatan.
- Pelatihan diberikan kepada peserta mengenai teknik penyuluhan inovasi dan cara mendampingi kegiatan pengembangan ide inovasi secara efektif. Pelatihan ini juga mencakup penggunaan aplikasi untuk pencatatan hasil pelaksanaan dan dokumentasi kegiatan.
- Uji coba sistem pelaksanaan dilakukan di beberapa desa terpilih untuk memastikan kelancaran program dan mengidentifikasi potensi masalah dalam pelaksanaan.

4. Implementasi Program Inovasi dan Pendokumentasian

- Inovasi ini diimplementasikan dengan memulai pelaksanaan inovasi di desa-desa untuk memberikan arahan dan konsultasi kepada peserta dalam merancang dan mendokumentasikan inovasi.
- Di setiap desa, diadakan sesi diskusi mengenai tantangan yang dihadapi dan solusinya, dengan melibatkan peserta aktif dalam diskusi dan penulisan laporan inovasi yang baik dan terstruktur.
- Semua kegiatan didokumentasikan dengan rapi menggunakan form manual dan aplikasi yang memudahkan proses pelaporan dan memantau perkembangan program.

5. Monitoring Berkala, Evaluasi, dan Penyempurnaan Sistem

- Evaluasi dilakukan setiap bulan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan inovasi, tingkat partisipasi peserta, serta dampak terhadap peningkatan kualitas dokumen inovasi yang dihasilkan.
- Laporan evaluasi disusun oleh tim pelaksana untuk memastikan bahwa setiap kegiatan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prinsip yang ada dalam SOP.
- Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan perbaikan terhadap SOP, termasuk memperbaiki metode pelatihan dan memperluas cakupan inovasi untuk mencapai lebih banyak desa.

BAB III

TAHAPAN PROSES PENCIPTAAN INOVASI

Tahapan Penciptaan Inovasi ini memerlukan waktu 9 (Sembilan) minggu atau 2 (dua) bulan 1 (satu) minggu dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahap Inisiasi dan Identifikasi Permasalahan (Minggu ke-3 Januari 2025)

Pada tahap pertama, Kantor Camat Muara Pinang melakukan analisis terhadap masalah utama yang menghambat pengelolaan inovasi di kecamatan, seperti kesulitan dalam merancang dan menciptakan inovasi. Serta mekanisme pelaporan inovasi secara terukur, serta keterbatasan forum yang memfasilitasi transformasi ide menjadi inovasi yang memenuhi standar. Melalui survei di desa serta pemetaan kebutuhan, ditemukan adanya kekurangan yang bisa dimanfaatkan menjadi kelebihan yaitu pemanfaatan limbah kulit durian menjadi sumber perekonomian tambahan bagi masyarakat desa.

2. Tahap Perancangan Sistem dan Pengembangan Platform (Minggu ke-4 Januari s.d ke-1 Februari 2025)

Tim inovasi bekerja sama dengan Camat dan perangkat desa, BPBD, serta warga desa terkait untuk merancang sistem inovasi berbasis daring yang akan digunakan untuk memfasilitasi pendampingan, konsultasi, dan dokumentasi inovasi secara terstruktur. Dalam perancangan sistem ini, fitur-fitur seperti pemantauan progres inovasi, validasi ide, penggabungan dokumen inovasi, serta dashboard visualisasi capaian hasil inovasi disusun. Sistem ini juga mencakup integrasi dengan platform lain, seperti forum konsultasi lintas warga desa, untuk memfasilitasi koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pengembangan dan dokumentasi inovasi. Penyusunan jadwal kegiatan pendampingan serta verifikasi ide inovasi juga dimulai untuk memastikan kelancaran proses pengumpulan dan pengolahan data inovasi.

3. Tahap Sosialisasi dan Pembentukan Tim Konsultasi (Minggu ke-2 s.d ke-3 Februari 2025)

Untuk memastikan keberhasilan implementasi inovasi tersebut, Kantor Camat Muara Pinang menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat dan perangkat desa melalui forum konsultasi dan pertemuan antar stakeholder, inovasi ini diperkenalkan dengan tujuan untuk meningkatkan rasa peduli dan keamanan masyarakat desa di Kecamatan Muara Pinang.

4. Tahap Uji Coba dan Implementasi (Minggu ke-4 Februari s.d ke-2 Maret 2025)

5. Tahap Evaluasi dan Penyempurnaan (Minggu ke-3 Maret 2025)

TAHAPAN INOVASI

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup tidak lagi dapat dicapai melalui kerja-kerja sektoral yang terisolasi. Melalui proposal "Sistem Terpadu Pemantauan Lingkungan" ini, kami menawarkan sebuah langkah progresif untuk mengintegrasikan data, menyatukan langkah aparat, dan memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam satu wadah koordinasi yang cepat dan akurat.

Kami meyakini bahwa implementasi sistem ini akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan tata kelola wilayah yang responsif, tangguh bencana, dan berkelanjutan. Dukungan, komitmen, serta sinergi dari segenap pemangku kepentingan—baik di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa—adalah kunci utama terwujudnya inovasi ini.

Demikian proposal ini kami sampaikan. Atas perhatian, kerja sama, dan dukungan Bapak/Ibu dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan lestari, kami ucapkan terima kasih.



PEMERINTAH KABUPATEN
EMPAT LAWANG

